



PELAKSANAAN PUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU
RUTH ROSIANA, Dwi Haryati, S.H., M.H

Universitas Gadjah Mada, 2011 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Ali, Chaidir, 1993, *Hukum Pajak Elementer*, Sresco, Bandung
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Bohari, 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Brotodihardjo, Santoso, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Jakarta
- Davey, Kennet J, 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Penerbit Universitas Indonesia (UI press), Jakarta
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum*, FH UMY, Yogyakarta
- Hadjon, Philipus. M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Hadjon, Philipus. M, et al., 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Hoesein, Zainal Arifin, 2009, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Huda, Ni'matul, 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta
- Kaho, Josef Riwu, 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta



PELAKSANAAN PUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU
RUTH ROSIANA, Dwi Haryati, S.H., M.H

Universitas Gadjah Mada, 2011 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

- Latief, Abdul, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintah Daerah*, UII Press, Yogyakarta
- Marbun, SF, et al., 2004, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta
- Muchsan, 1997, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah: Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta
- Mustofa, 2010, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Karya Media, Yogyakarta
- Pudyatmoko, Y. Sri dan W. Riawan Tjandra, 1996, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- _____, 2009, *Hukum Administrasi di Daerah*, UII Press, Yogyakarta
- _____, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, UII Press, Yogyakarta
- Saidi, Muhammad Djafar, 2007, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Press, Jakarta
- Sapromo, Ade, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya
- Siahaan, Marihot P, 2006, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soehino, 1981, *Hukum Tata Negara, Penyusunan dan Penetapan Perda*, Liberty, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soemitro, Rochmat, 1979, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Jakarta
- Suandy, Erly, 2005, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta



PELAKSANAAN PUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU

RUTH ROSIANA, Dwi Haryati, S.H., M.H

Universitas Gadjah Mada, 2011 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Sutedi, Adrian, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan

Utrecht, E, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya

Waluyo, Bambang 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahan-perubahannya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44)
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130)
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59)
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130)
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)



PELAKSANAAN PUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU

RUTH ROSIANA, Dwi Haryati, S.H., M.H

Universitas Gadjah Mada, 2011 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)
(Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51)
(Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745)

Permenag Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksana PP 24 Tahun 1997

Surat Menteri Keuangan Nomor S-632/MK.07/2010

Surat Ketetapan Bupati Pringsewu Nomor 973/07.a/D.04/2011

C. MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK

[http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=10773&q=tjiptardj
&o&hlm=1](http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=10773&q=tjiptardj&o&hlm=1),

Majalah Tempo Edisi 14-20 Februari 2011

D. KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

E. KARYA ILMIAH

Skripsi Rizky Wulandari, 2010, *Evaluasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Pengawasan Produk Hukum Daerah di DIY: Studi Kasus Terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah*



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**PELAKSANAAN PUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB) SETELAH DIBERLAKUKANNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN PRINGSEWU**

RUTH ROSIANA, Dwi Haryati, S.H., M.H

Universitas Gadjah Mada, 2011 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

